



## ANALISIS PROGRAM UNGGULAN RODANYA MAS BAGIA KOTA MAGELANG BERBASIS *CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT* (CIPP)

*Rasidi<sup>1)</sup>, Hermahayu<sup>2)</sup>, Robiul Fitri Mashitoh<sup>3)</sup>*

Universitas Muhammadiyah Magelang

*e-mail: rasidi@unimma.ac.id*

### ABSTRAK

Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan program Rodanya Mas Bagia untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun belum ada informasi yang menunjukkan evaluasi, keberhasilan, kendala, hambatan maupun daya dukung program unggulan Rodanya Mas Bagia ini. Maka dari itu, diperlukan analisis program secara objektif untuk memantau kemajuan dan keberhasilan program Rodanya Mas Bagia, untuk memenuhi jawaban akan transparansi program unggulan Pemerintah Kota Magelang. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan: 1) hasil evaluasi *contexts, input, process, product* tentang program Rodanya Mas Bagia; 2) menilai kelayakan, dan 3) menyusun rekomendasi keberlanjutan. Penelitian ini dilakukan secara evaluatif dengan pendekatan model evaluasi CIPP. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data pemetaan kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui respon masyarakat sasaran program, kinerja pelaku, dan panitia pelaksana program. Populasinya yakni seluruh RT yang berjumlah 1.201 RT. Sampel dengan rumus slovin diperoleh sebanyak 93 RT. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *proportional random sampling*. Metode pengumpulan data yaitu dengan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase untuk menentukan tingkat kelayakan aspek evaluasi *CIPP*. Analisis rekomendasi dan keberlanjutan menggunakan deskripsi kualitatif, dengan data jenuh dari triangulasi data dengan triangulasi, sumber, metode, dan waktu. Upaya meningkatkan kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan waktu penelitian dan pencermatan kembali data hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi evaluasi CIPP dijelaskan secara data kuantitatif bahwa aspek yang paling rendah kuantifikasinya adalah evaluasi *context* dengan persentase 58%, evaluasi *input* dengan persentase 69%. Komponen evaluasi proses dengan persentase 66%. evaluasi produk dengan persentase 69%. Kelayakan program, aspek hukum memenuhi aspek legalitas hukum, tidak melanggar aspek hukum dan perundangan dan layak diteruskan. Budaya positif yang memperkuat pemberdayaan antara lain budaya gotong royong menyelesaikan permasalahan, musyawarah mufakat, mengidentifikasi permasalahan, dan berdiskusi serta bersepakat menentukan solusi. Keberlanjutan program dilanjutkan dan diteruskan dengan sosialisasi, pemahaman masyarakat terkait tujuan dan esensi program. Partisipasi masyarakat mampu dioptimalkan sehingga meningkatkan derajat kesejahteraan. Skema pendamping teknis untuk usulan program sesuai dengan bidang profesionalnya.

**Kata kunci:** *Program Pemberdayaan, Evaluasi CIPP, Kelayakan, Keberlanjutan.*

### ABSTRACT

*The City Government of Magelang has implemented the Rodanya Mas Bagia program to reduce the poverty rate. There is no information showing the evaluation, success, constraints, obstacles or carrying capacity of the Wheel of Mas Bagia flagship program. It is necessary to analyze the program objectively to monitor the progress and success of the Rodanya Mas Bagia program, to fulfill the answer to the transparency of the Magelang City Government's flagship program. The research objective is to describe; 1) results of evaluation of the context, input, process, product regarding the wheel program, bro; 2) assess feasibility, 3) prepare sustainability recommendations. Evaluative research with the CIPP evaluation model approach. The primary data source in this study is community satisfaction mapping data obtained through the response of the program target community, the performance of the actors, the program implementing committee. The population of all RTs is 1,201 RTs. Samples with the slovin formula obtained as*



*many as 93 RT. The sampling technique in this study was a proportional random sampling technique. Data collection methods with questionnaires, interviews, observation, documentation. The data analysis used is descriptive percentage to determine the feasibility level of the CIPP evaluation aspect. Analysis of recommendations and sustainability with qualitative descriptions, with saturated data from triangulation of data, sources, methods, and time. Efforts to increase the credibility of the data are carried out by extending the research time and re-examining the research data obtained. The results of the study, the description of the CIPP evaluation explained in quantitative data that the aspect with the lowest quantification is context evaluation with a percentage of 58%, input evaluation with a percentage of 69%. Process evaluation component with a percentage of 66%. product evaluation with a percentage of 69%. The feasibility of the program, the legal aspects fulfill the legal legality aspects, do not violate legal and statutory aspects and are worthy of being continued. A positive culture that strengthens empowerment: a culture of mutual cooperation in solving problems, reaching consensus, identifying problems, and discussing and agreeing on solutions. Sustainability of the program is continued and continued with socialization, understanding of the community regarding the objectives and essence of the program. Community participation can be optimized so as to increase the degree of welfare. Scheme of technical assistance for program proposals in accordance with the professional field.*

**Keywords:** *Empowerment Program, CIPP Evaluation, Feasibility, Sustainability.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan jumlah penduduk miskin sejalan dengan persentase penduduk miskin. Sebelum tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang di atas 10 ribu jiwa. Sementara itu, semenjak tahun 2018, angka kemiskinan berkisar pada angka 9 ribu jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang sebesar 9.440 jiwa. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Magelang secara umum terus menurun. Pada periode tahun 2003-2019, penurunan tingkat kemiskinan di Kota Magelang terjadi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian pada tahun 2003, 2008, dan 2011 (BPS, 2021).

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan (Wahyu Azizah & Kusuma, 2018). Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan



percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Namun seluruh upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya 1) memperbaiki program perlindungan sosial; 2) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; 3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta 4) menciptakan pembangunan yang inklusif (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Kota Magelang salah satunya adalah dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maju sehat bahagia ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 21 Juni 2021. Rodanya Mas Bagia dilaksanakan dengan maksud untuk lebih meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan. Tujuan dari program ini yaitu (1) memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya; (2) memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT; (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Sasaran dari program unggulan ini adalah seluruh RT yang sudah terbentuk secara resmi di daerah. Ada pelaksana di tingkat kota (tim pengendali, verifikasi usulan dan perencanaan, verifikasi keuangan, verifikasi rencana anggaran dan biaya dan gambar teknik, tim monitoring, tim pembina teknis), pelaksana tingkat kecamatan, pelaksana tingkat kelurahan, bentuk kegiatan program rodanya mas bagian adalah pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT/RW.

Tantangan program pengentasan kemiskinan pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia telah berjalan 10 bulan yaitu 1) lemahnya instusi pengelola program pengentasan kemiskinan; 2) kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program



pengentasan kemiskinan; 3) belum ada mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan; dan 4) dukungan anggaran operasional pengentasan kemiskinan yang masih terbatas.

Potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi sehingga menjadi *leading sector (rural – led development)*, proses ini akan mendukung pertumbuhan menjadi seimbang. Sumber daya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah. Negara akan ikut bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan, terlebih kepentingan perorangan. Negara akan menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan.

Kelemahan (1) karena pendekatan 'target' dan 'top-down'; (2) pengabaian nilai-nilai lokal dan bias 'outsiders'; (3) kurangnya partisipasi; dan (4) pendekatan yang tidak holistik. Indikator kinerja pengurangan angka kemiskinan bisa dilihat dari 5 aspek yaitu pendapatan masyarakat, pembangunan industri, lingkungan hidup, pendidikan budaya, dan infrastruktur. Upaya untuk melakukan intervensi untuk mencapai indikator dilakukan dengan klaster penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan klaster I yaitu (1) Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (3) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM); (4) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS); dan (5) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).

Program-program penanggulangan kemiskinan klaster II antara lain:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang terdiri atas:
  - a. PNPM Mandiri Perdesaan
  - b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)
  - c. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)



- d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
  - e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
  - f. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
  - g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua
  - h. PNPM Mandiri Perkotaan
  - i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
  - j. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
  - k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
  - l. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
  - m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
  - n. PNPM-Mandiri Pariwisata
  - o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)
2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif.

Sedangkan penanggulangan kemiskinan klaster III terdiri atas:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

Informasi tentang pelaksanaan Rodanya Mas Bagia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Mas Bagia

No	Uraian Kegiatan
1	Pada tanggal 11 November 2021 <i>jateng.antaranews</i> , butuh pendamping yang mumpuni.
2	Pada tanggal 18 Maret 2021 <i>humas.magelangkota.go.id</i> , setiap RT menyusun rencana kebutuhan melalui RKM.
3	Pada tanggal 11 November 2021 harian <i>merapi.com</i> , memerlukan pendamping mumpuni di tingkat kelurahan.



---

No	Uraian Kegiatan
4	Pada tanggal 7 Februari 2022 <i>kedu.suaramerdeka.com</i> , bekal Pokmas tentang materi Rodanya Mas Bagia.
5	Pada 6 Januari 2022 <i>jatengprov.go.id</i> , pembekalan pengadaan barang dan jasa.
6	Pada tanggal 25 Februari 2022 <i>radarsemarang.jawapos.com</i> , pengalokasian APBD untuk tiap Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp 30 juta per tahun.
7	Pada tanggal 1 Maret 2022 <i>bappeda.magelangkota.go.id</i> , Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu, ST, M.Eng mengatakan bahwa Rodanya Mas Bagia adalah salah satu dari 9 branding Program Unggulan Kota Magelang.
8	Pada tanggal 14 Maret 2022 <i>magelang.ekspres.com</i> , pergerakan Rodanya Mas Bagia di Kampung Pemulung Kota Magelang.

---

Berdasarkan informasi yang telah dilakukan dalam pencarian di internet belum ada informasi yang menunjukkan evaluasi, keberhasilan, kendala, hambatan, maupun daya dukung program unggulan Rodanya Mas Bagia ini. Dengan dasar ini maka perlu analisis program secara objektif untuk memantau kemajuan dan keberhasilan program Rodanya Mas Bagia agar dapat memenuhi jawaban akan transparansi program unggulan pemerintah kota.

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Terdapat beberapa pengertian tentang program. Program adalah rencana; program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Pemilihan model evaluasi perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik program yang akan dievaluasi. Model evaluasi program berbasis CIPP pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program *improvement-oriented evaluation*, atau bentuk evaluasi pengembangan *evaluation for development* (Kurniawati, 2021). Artinya, model CIPP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan



masuk secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau, minimal, bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada. (Mahmudi, 2011). Kelebihan Model CIPP adalah: 1) evaluator dapat melakukan evaluasi ketika program belum dimulai dan selama program berlangsung; 2) model CIPP ditujukan untuk melayani kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan program; 3) keputusan dalam Model CIPP berupa penilaian apakah kebutuhan-kebutuhan sasaran program sudah atau belum terpenuhi; dan 4) Model CIPP mencakup evaluasi formatif dan sumatif (Ardho dkk., 2021).

Evaluasi formatif atau 50 proaktif dimaksudkan untuk mengambil keputusan, sedangkan evaluasi sumatif atau retroaktif terutama untuk memberikan informasi tentang akuntabilitas. Evaluasi konteks, input, proses, dan produk dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan keputusan peran formatif dan penyajian informasi mengenai akuntabilitas peran sumatif. Evaluasi program unggulan pemberdayaan masyarakat maju sehat dan bahagia (Rodanya Mas Bagia) dalam menekan angka kemiskinan Kota Magelang dipilih dengan analisis CIPP hal ini diharapkan mampu memberikan *output* atau keluaran berupa: evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi, proses dan evaluasi produk. Hasil ini kemudian di reduksi untuk memperoleh data dan evaluasi yang objektif, sehingga bisa dijadikan rekomendasi untuk perbaikan maupun untuk pengambilan keputusan terkait program unggulan pemerintah khususnya keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat maju sehat dan bahagia (Rodanya Mas Bagia). Artikel ini membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, metode, hasil, dan pembahasan.

## **B. METODE**

Penelitian evaluasi ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Muryadi, 2017). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data pemetaan kepuasan masyarakat diperoleh melalui respon masyarakat sasaran program, kinerja dari pelaku dan panitia pelaksana program Rodanya Mas Bagia. Evaluasi



*context*, dengan melakukan sumber analisis melalui lingkungan relevan, kebutuhan, peluang, karakteristik pengguna, dan karakteristik program. Kelayakan program dilakukan dengan menganalisis hasil CIPP dengan perspektif hukum, ekonomi, budaya, target dan sasaran, manajemen. Keberlanjutan program dilakukan dengan menganalisis hasil CIPP dengan mengerucut pada rekomendasi program untuk untuk dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh RT yang terbentuk secara resmi ada di Kota Magelang yang berjumlah berjumlah sebesar 1.201 RT. Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Slovin (N. Setiawan, 2017). Maka sampel yang didapatkan adalah sebanyak 93 RT sebagai subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *proportional random sampling*. Instrumen pengumpulan data yang digunakan menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode *mixed methods*, merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Jenis *mix method* yang dilakukan dengan *Mixed Methods* model *Sequential* adalah penelitian kombinasi (penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif) yang dilakukan secara berurutan dan dalam waktu yang berbeda (AY Rusdyantoro, 2018). Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan deskriptif persentase. Analisis data dari data deskriptif yang menonjol atau berbeda secara signifikan digali menggunakan wawancara, observasi, dan pencermatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, simpulan, saran dan rekomendasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **C.1. Evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP)**

Perolehan data untuk analisis dilakukan dengan menurunkan aspek, sumber data, jenis data, teknisk analisis data, aspek yang diteliti, dan masyarakat



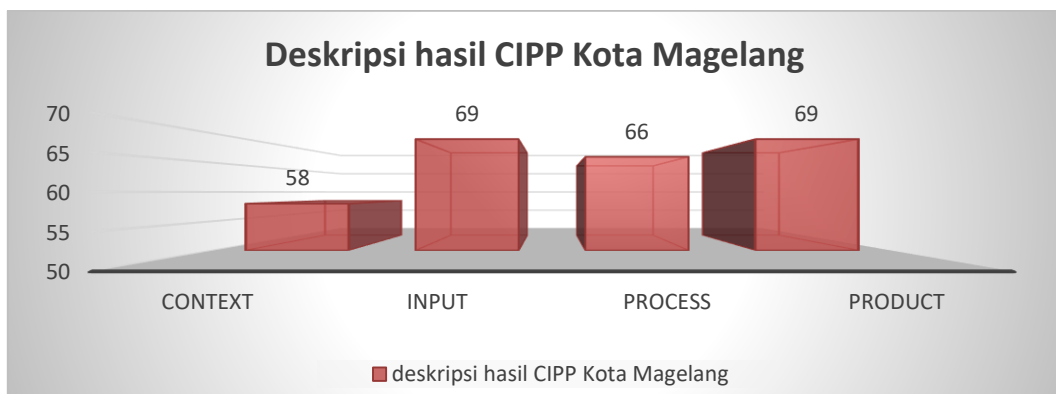


sasaran. Mekanisme perolehan data dengan *brekdown* dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Spesifikasi Perolehan Data

Aspek	Sumber	Jenis	Analisis Data	Aspek yang Diteliti	Masyarakat Sasaran di RT
<b>Context</b>	Masyarakat sasaran di RT	Data kualitatif: hasil pemaknaan kebutuhan di masyarakat RT	Analisis data kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lingkungan relevan</li> <li>•Kebutuhan</li> <li>•Peluang</li> <li>•Karakteristik pengguna</li> <li>•Karakteristik program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Program sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat sasaran</li> <li>•Kesesuaian program mengoptimalkan sumber daya lingkungan</li> <li>•Arahan atau ketentuan program mengakomodir kepentingan masyarakat sasaran</li> <li>•Program memberikan peluang % dampak langsung dan % tidak langsung pada pengentasan kemiskinan</li> <li>•Karakteristik program mempermudah pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
<b>Input</b>	Tim Rodanya Mas Bagia Tim Pelaksana kota Tim pelaksana kecamatan Tim pelaksana kelurahan	Data kualitatif: hasil perolehan data tentang indikator yang	Analisis data kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SDM</li> <li>•Workshop/ pelatihan</li> <li>•Fasilitas</li> <li>•Manajemen waktu</li> <li>•informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Karakteristik SDM di tingkat RT mampu memahami ketentuan program</li> <li>•Workshop/pelatihan sesuai dengan tujuan program</li> <li>•Fasilitas (tempat, bangunan, alat, dll) mendukung masyarakat sasaran dalam eksekusi program</li> <li>•Masyarakat sasaran diberikan waktu yang cukup dalam merencanakan, melaksanakan program</li> <li>•Masyarakat sasaran memperoleh kemudahan, kelengkapan, kejelasan informasi terkait program</li> </ul>
<b>Process</b>	Tim Rodanya Mas Bagia Tim Pelaksana kota Tim pelaksana kecamatan Tim pelaksana kelurahan	Data kuantitatif: data Ordinal Evaluasi kegiatan sesuai dengan Perwal 24 tahun 2021	Mix method: Interaksional, Deskriptif persentase dan deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pelaksanaan program</li> <li>•Kesanggupan</li> <li>•Pemanfaatan sarana prasarana</li> <li>•Kemampuan SDM sasaran</li> <li>•menyelesaikan tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•masyarakat sasaran melaksanakan program prosedur/ketentuan</li> <li>•masyarakat sasaran menentukan program sesuai dengan kesanggupan</li> <li>•masyarakat sasaran mengoptimalkan sarpras pemerintahan dengan</li> <li>•masyarakat sasaran memiliki kemampuan yang cukup dalam merencanakan dan melaksanakan program</li> <li>•masyarakat sasaran menyelesaikan tugas administratif dan non administratif</li> </ul>
<b>Product</b>	Masyarakat sasaran di RT	Data kuantitatif: ordinal, Pemetaan hasil bentuk kegiatan bab V sesuai Perwal 24 tahun 2021	Mix method: Interaksional, Deskriptif persentase dan deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ketercapaian program</li> <li>•Luaran setiap proses</li> <li>•Variasi program</li> <li>•Ketepatan program</li> <li>•Waktu pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Persentase % laporan kemajuan program di masyarakat sasaran secara kuantitatif &amp; kualitatif</li> <li>•Luaran setiap kegiatan sesuai dengan rencana/proposal program</li> <li>•Pemetaan Variasi program sesuai perwal 24</li> <li>•Program sesuai dengan permasalahan yang urgen/prioritas di masyarakat.</li> <li>• Waktu pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>

Aspek yang dijadikan indikator untuk menentukan kelayakan dengan indikator pada setiap proses evaluasi *context* (lingkungan relevan, kebutuhan, peluang, karakteristik pengguna, karakteristik program), *input* (SDM, workshop/pelatihan, fasilitas, manajemen waktu, informasi), *proses* (pelaksanaan program, kesanggupan, pemanfaatan sarana prasarana, kemampuan sdm sasaran, menyelesaikan tugas), dan *produk* (ketercapaian program, luaran setiap proses, variasi program, ketepatan program, waktu pelaksanaan). Berdasarkan angket yang disebar di kelompok masyarakat sasaran pada tingkat RT, kelurahan dan kecamatan diperoleh sebaran data dengan persentase sebagai berikut.



Gambar 1. Deskripsi hasil CIPP Kota Magelang

Deskripsi evaluasi *Context*, *Input*, *Process*, *Product* (CIPP) dijelaskan secara data kuantitatif bahwa rata-rata perolehan data CIPP yaitu 65,5%. Setelah diperoleh persentase kemudian dikategorikan berdasarkan kategori tingkat kelayakan (Arikunto: 2009).

Tabel 3. Kriteria Kelayakan Program

No	Skor Perolehan Persentase	Kategori Kelayakan
1	< 21 %	Sangat Tidak layak
2	21 – 40 %	Tidak Layak
3	41 – 60 %	Cukup Layak
4	61 – 80 %	Layak
5	81 – 100 %	Sangat Layak



Berdasarkan konversi tingkat kelayakan program secara keseluruhan program Rodanya Mas Bagia masuk dalam kategori layak. Aspek yang paling rendah kuantifikasinya adalah aspek evaluasi *context* dengan persentase 58%. Aspek evaluasi *context* terdiri atas beberapa indikator evaluasi yaitu: 1) program sesuai kebutuhan dengan masyarakat sasaran di tingkat RT; 2) kesesuaian program mengoptimalkan sumber daya lingkungan; 3) arahan atau ketentuan program mengakomodir kepentingan masyarakat sasaran di tingkat RT; 4) program memberikan peluang dampak langsung dan tidak langsung pada pengentasan kemiskinan; dan 5) karakteristik program mempermudah pemberdayaan masyarakat. Aspek evaluasi konteks dalam program Rodanya Mas Bagia adalah analisis kebutuhan (*needs assessment*). Berdasarkan perolehan data hasil angket di tiga kecamatan baik Magelang Selatan, Magelang Tengah maupun Magelang Utara memperoleh persentase yang sama yaitu persepsi masyarakat sasaran tentang konteks program Rodanya Mas Bagia diperoleh persentase sebesar 56%. Berdasarkan konversi tingkat kelayakan program secara keseluruhan program Rodanya Mas Bagia masuk dalam kategori cukup layak.

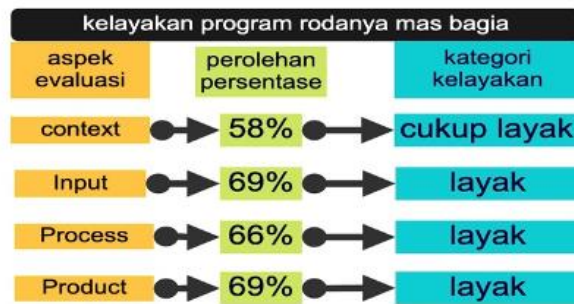
Komponen evaluasi *input* atau masukan memusatkan perhatian pada rencana dan strategi yang harus dilakukan. Pertanyaan utamanya adalah “apa yang harus dilakukan (*what should be done*) dengan capaian persentase 69%”. Aspek evaluasi *input* meliputi; 1) karakteristik Sumber Daya Manusia di tingkat RT mampu memahami ketentuan program; 2) workshop/pelatihan sesuai dengan tujuan program; 3) fasilitas (tempat, bangunan, alat, dll) mendukung masyarakat sasaran dalam eksekusi program; 4) masyarakat sasaran diberikan waktu yang cukup dalam merencanakan, melaksanakan program; 5) masyarakat sasaran memperoleh kemudahan, kelengkapan, kejelasan informasi terkait program. Perolehan data hasil angket diperoleh bahwa di tiga Kecamatan baik Magelang Selatan, Magelang Tengah, maupun Magelang Utara memperoleh persentase yang beragam yaitu persepsi masyarakat sasaran tentang evaluasi *input* program Rodanya Mas Bagia diperoleh persentase di Kecamatan Magelang Selatan sebesar 58%, Kecamatan Magelang Tengah sebesar 54%, dan Kecamatan Magelang Utara



sebesar 52%. Berdasarkan konversi tingkat kelayakan program secara keseluruhan program Rodanya Mas Bagia masuk dalam kategori cukup layak.

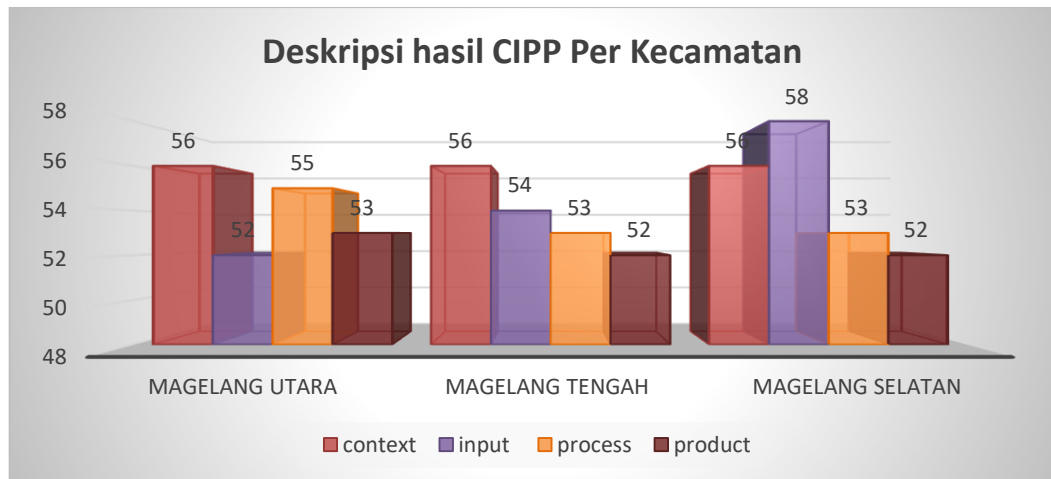
Fokus kajian komponen evaluasi proses adalah pelaksanaan program. Pertanyaan kuncinya ”apakah program sedang dilaksanakan (*Is it being done*) diperoleh capaian data dengan persentase 66%”. Aspek evaluasi yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut 1) masyarakat sasaran melaksanakan program prosedur/ketentuan; 2) masyarakat sasaran menentukan program sesuai dengan kesanggupan; 3) masyarakat sasaran mengoptimalkan fasilitas/sarana prasarana pemerintahan untuk pelaksanaan program; 4) masyarakat sasaran memiliki kemampuan yang cukup dalam merencanakan dan melaksanakan program; dan 5) masyarakat sasaran menyelesaikan tugas administratif dan non administratif. Perolehan data hasil angket diperoleh bahwa di tiga Kecamatan baik Magelang Selatan, Magelang Tengah, maupun Magelang Utara memperoleh persentase yang beragam yaitu persepsi masyarakat sasaran tentang variabel proses program Rodanya Mas Bagia diperoleh persentase sebesar Magelang Selatan sebesar 53%, Magelang Tengah sebesar 53%, dan Magelang Utara sebesar 55%. Berdasarkan konversi tingkat kelayakan program secara keseluruhan program Rodanya Mas Bagia masuk dalam kategori cukup layak.

Komponen terakhir dalam model evaluasi CIPP adalah komponen evaluasi produk. Titik tolak evaluasi pada komponen ini terletak pada pertanyaan “apakah program sukses (*Did it success*) dengan persentase 69%”. Aspek evaluasi *product* yang diteliti meliputi 1) persentase laporan kemajuan program di masyarakat sasaran secara kuantitatif & kualitatif; 2) luaran setiap kegiatan sesuai dengan rencana/proposal program; 3) pemetaan variasi program sesuai Peraturan Walikota Magelang No 24 Tahun 2021; 4) program sesuai dengan permasalahan yang urgen/prioritas di masyarakat; dan 5) waktu pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan. Secara umum dapat diilustrasikan tentang gambaran hasil evaluasi CIPP yang dikonversikan dengan tingkat kelayakan (Arikunto: 2009), sebagai berikut.



Gambar 2. Tingkat Kelayakan Aspek CIPP

Perolehan data hasil angket diperoleh bahwa di tiga kecamatan baik Magelang Selatan, Magelang Tengah, maupun Magelang Utara memperoleh persentase yang beragam yaitu persepsi masyarakat sasaran tentang variabel *product* pada program Rodanya Mas Bagia diperoleh persentase sebesar Magelang Selatan sebesar 52%, Magelang Tengah sebesar 52%, dan Magelang Utara sebesar 53%. Ilustrasi tentang perolehan evaluasi CIPP tiap variabel dan tiap kecamatan seperti Gambar 3.



Gambar 3. Deskripsi Hasil CIPP Setiap Kecamatan di Kota Magelang

Berdasarkan wawancara dan *Focus Group Discussion* di tingkat RT, kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperoleh informasi tentang perbedaan tingkat capaian di tiga kecamatan ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil pada tiga daerah yang diteliti. Wawancara yang dilakukan pada ketua RT, lurah, pendamping, kelompok masyarakat (pokmas)



yang terdiri atas unsur masyarakat dan perwakilan RT. Hasil tersebut divalidasi dengan informasi dari lurah, kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil perbedaan capaian evaluasi yang kemudian dilakukan triangulasi baik waktu, informan, maupun metode diperoleh kajian data tentang 3 faktor prioritas. Faktor ini diperoleh dari analisis deskriptif dilihat dari skor yang paling rendah terkait program Rodanya Mas Bagia. Faktor ini juga didukung hasil dari telaah pada wawancara dan *Focus Group Discussion* dengan mitra baik masyarakat di tingkat RT, tim pelaksana di tingkat kecamatan, tim pelaksana di tingkat kelurahan, dan tim pendamping. Hasil telaah tersebut diperoleh 3 faktor prioritas yang mempengaruhi hasil evaluasi program yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi kualitas kelompok masyarakat sasaran yang meliputi peningkatan kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan untuk berpikir sistematis, kemampuan untuk mengadministrasikan dan kemampuan untuk melakukan tindak lanjut. Peningkatan kualitas pendamping juga difokuskan pada kemampuan untuk melakukan refleksi kegiatan di kelompok dampungannya serta peningkatan kemampuan untuk melakukan lokakarya secara berkelompok dan berbagi praktik baik di kelompok masyarakat secara kolektif.
2. Aspek teknis, pola koordinasi bisa dilakukan dengan memodifikasi koordinasi dengan menambahkan tindak lanjut koordinasi dengan mempublikasikan informasi publik tentang hasil koordinasi di tingkat kelurahan sehingga masyarakat lebih memahami tentang kemajuan program. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas koordinasi bisa dilakukan dengan surat edaran atau pamflet resmi yang berisi tentang program Rodanya Mas Bagia serta bentuk kontribusi yang bisa diberikan kelompok masyarakat sasaran sehingga masyarakat sasaran memahami peran dan bentuk kontribusinya.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat, perlu informasi disampaikan secara langsung oleh agen informasi untuk sosialisasi Rodanya Mas Bagia bukan hanya untuk pengurus RT tetapi juga untuk anggota masyarakat, selain untuk meningkatkan penerimaan program, berkontribusi aktif dalam program serta



meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Kota Magelang.

### **C.2. Kelayakan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat dan Bahagia (Rodanya Mas Bagia)**

Program Rodanya Mas Bagia memiliki payung hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dokumen dari produk hukum yang mendukung pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia. Produk hukum tersebut antara lain:

1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia.
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
5. Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No,or 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.



Aspek hukum terkait program memenuhi aspek legalitas hukum sehingga program Rodanya Mas Bagia tidak melanggar aspek hukum dan perundangan sehingga layak untuk diteruskan. Program inklusif dengan budaya yang positif di Kota Magelang, secara umum budaya positif terkait program tentang keterlibatan dan budaya masyarakat. Keterlibatan masyarakat mulai ditunjukkan yakni melakukan rebug Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Adapun pelaksanaan programnya dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah dilaksanakan, maka pemanfaatannya kembali ke masyarakat. Sejumlah program yang dilaksanakan diantaranya mendirikan balai belajar dengan *wifi gratis*, *urban farming* untuk pemberdayaan lahan pekarangan dan pemasangan CCTV untuk keamanan lingkungan. Pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia dengan anggaran Rp 30 juta untuk setiap rukun tetangga (RT). Terdapat 1.032 RT di Kota Magelang yang tersebar di 17 kelurahan di 3 kecamatan. Bentuk program yang dilaksanakan di setiap RT bisa berbeda-beda. Acuanannya adalah program tersebut sesuai dan mendukung tema pembangunan daerah di tahun berjalan.

Memasuki tahun kedua pada 2022, masyarakat mulai dilibatkan untuk pelaksanaan. Pemkot Magelang memberikan pembekalan kepada Kelompok Masyarakat (pokmas) yang akan menjadi pelaksana program-program Rodanya Mas Bagia. Berdasar kajian empiris dan teoritis diperoleh budaya positif yang muncul dan memperkuat pemberdayaan di masyarakat yaitu 1) budaya gotong royong membangun dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat; dan 2) budaya untuk musyawarah mufakat, bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan kemudian berdiskusi serta bersepakat untuk menentukan solusi permasalahan.

Hasil analisis dari program menunjukkan bahwa program Rodanya Mas Bagia ini layak diteruskan dengan pertimbangan aspek manfaat dan dampak dari program yang secara positif mendukung masyarakat di Kota Magelang untuk meningkatkan peluang, pendapatan, dan kesejahteraan. Program Rodanya Mas Bagia ini juga bisa bertahan lama dan berkelanjutan dengan manajemen program yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan kondisi kultural masyarakat. Keberlanjutan program layak diteruskan karena secara hukum telah memenuhi





aspek penegakan hukum, secara teknis program ini juga layak karena panduan teknis telah disiapkan, dan terdapat tim pelaksana yang mengawal program Rodanya Mas Bagia. Kelayakan yang utama dan mendukung program yaitu kelayakan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan aspek manfaat dan program stimulan dari hasil musyawarah yang meningkatkan peluang, ruang kreativitas, dan kesejahteraan ekonomi maupun sosial.

### **C.3. Rekomendasi Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat dan Bahagia (Rodanya Mas Bagia)**

Rekomendasi perbaikan program dengan aspek manajemen SDM, aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ini diperoleh dari telaah data hasil dari angket, catatan observasi, catatan wawancara, dan dokumen hasil diskusi dengan mitra sasaran di tingkat RT maupun tim pelaksana di tingkat kecamatan, dan kelurahan. Keberlanjutan program ini direkomendasikan oleh mitra dan tim pelaksana untuk ditingkatkan kualitasnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan kualitas kelompok masyarakat sasaran, yang meliputi peningkatan kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan untuk berpikir sistematis, kemampuan untuk mengadministrasikan, dan kemampuan untuk melakukan tindak lanjut. Peningkatan kualitas pendamping juga difokuskan pada kemampuan untuk melakukan refleksi kegiatan di kelompok dampungannya, serta peningkatan kemampuan untuk melakukan lokakarya secara berkelompok dan berbagai praktik seperti di kelompok masyarakat secara kolektif.

#### **1. Aspek Teknis**

Pada aspek teknis, pola koordinasi bisa dilakukan dengan memodifikasi koordinasi dengan menambahkan tindak lanjut koordinasi dengan mempublikasikan informasi publik tentang hasil koordinasi di tingkat kelurahan, sehingga masyarakat lebih memahami tentang kemajuan program. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas koordinasi maka dapat dilakukan dengan surat edaran atau pamflet resmi yang berisi tentang program Rodanya Mas Bagia, serta



bentuk kontribusi yang bisa diberikan kelompok masyarakat sasaran sehingga masyarakat sasaran memahami peran dan bentuk kontribusinya. Peningkatan sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) dalam mendefinisikan kemiskinan yakni sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan tetap untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktifitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan (Herlina & Komariah, 2017).

Peningkatan pemahaman masyarakat perlunya informasi disampaikan secara langsung oleh agen informasi untuk sosialisasi Rodanya Mas Bagia, bukan hanya untuk pengurus RT tetapi juga untuk anggota masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan program, berkontribusi aktif dalam program, dan meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah Kota Magelang.

## **2. Aspek Perencanaan**

Salah satu aspek perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah rembug warga melalui RKM. Rembug warga adalah kegiatan non formal berupa forum musyawarah warga di tingkat Rukun Warga (RW) yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan dan penjarangan aspirasi masyarakat bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kegiatan Musrenbang Kelurahan. Rembug warga adalah embrio usulan kegiatan bagi penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rembug Warga diselenggarakan untuk membahas, memprioritaskan, dan merumuskan usulan dari masyarakat serta melakukan identifikasi permasalahan secara nyata bagi penyiapan usulan kebutuhan kegiatan pembangunan di tingkat RW. Besarnya kompleksitas aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat pemerintahan terendah



tersebut, maka salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan pembangunan adalah dengan membuat perencanaan pembangunan yang strategis sehingga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada, mengingat kemiskinan merupakan salah satu penyebab ketertinggalan suatu daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga berisi pemberian hak dan kesempatan yang luas bagi desa untuk melakukan pembangunan terhadap wilayahnya sendiri. Adanya landasan tersebut merupakan salah satu pendorong bagi pemerintah desa untuk membuat perencanaan pembangunan yang strategis (Sutopo & Shabrina, 2022).

Tujuan umum program Rodanya Mas Bagia dalam aspek perencanaan adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat di tingkat RW dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan khususnya yaitu untuk menghimpun dan melakukan identifikasi permasalahan, serta menetapkan daftar usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Beberapa struktur organisasi program unggulan Rodanya Mas Bagia meliputi tim pengendali, tim verifikasi usulan dan perencanaan, tim verifikasi keuangan, tim verifikasi rencana anggaran dan biaya, tim pembina teknis, tim pelaksana di tingkat kecamatan, tim pelaksana di tingkat kelurahan. Tim pelaksana yang terlibat dalam program Rodanya Mas Bagia diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021).

### **3. Aspek Pelaksanaan**

Rodanya Mas Bagia dilaksanakan dengan maksud untuk lebih meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan. Pelaksanaan Rodanya Mas Bagia bertujuan untuk 1) memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya; 2) memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT; 3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat; dan 4) meningkatkan peran serta



dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Hermawati, 2018).

#### **4. Aspek Pengawasan**

Prinsip pengelolaan diharapkan mampu memastikan program Rodanya Mas Bagia sesuai dengan prinsip pengelolaan program unggulan daerah, yang meliputi transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Transparan, kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT. Upaya meningkatkan transparansi program tentang kemajuan, proses, usulan, anggaran bisa dilakukan dengan publikasi kegiatan dan status validasi serta verifikasi yang bisa diakses secara umum. Pemerintah Kota Magelang bisa menyusun *platform* digital atau menempelkan *platform* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling dekat dengan konsep pemberdayaan. Adanya *platform* digital yang menunjukkan tentang kegiatan, kemajuan, dan pendanaan menjadikan kepercayaan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan Pemerintahan Kota Magelang. Partisipatif, seluruh anggota masyarakat di lingkungan wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berperan teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi. Salah satu temuan dari hasil empiris penelitian adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk dalam kegiatan penyusunan rencana, realisasi dan tindak lanjut program. Pemanfaatan pengadaan barang jasa, fasilitas umum, dan kegiatan kemasyarakatan diharapkan bisa dikemas dengan baik. Hal ini juga bisa dilakukan dengan melakukan forum praktik baik tentang pengusulan, realisasi, dan pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia dalam sebuah pameran baik secara luring atau daring melalui *platform* digital sehingga terjadi proses pengimbasan dan saling menginspirasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Akuntabel,



seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Upaya untuk melaporkan pertanggungjawaban baik secara administratif diharapkan pemerintah mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi administratif, sehingga pertanggungjawaban secara dokumen mampu meningkatkan kemudahan bagi penyelenggara dan sasaran program. Upaya peningkatan akuntabilitas melalui teknis, diharapkan informasi tentang alur, mekanisme dan prosedur program Rodanya Mas Bagia dilakukan evaluasi secara rutin untuk memangkas prosedur yang kurang efisien bagi pengguna atau masyarakat sasaran di tingkat RT, harapannya program dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mengarahkan pada program yang berpihak dan mengutamakan pada kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah pengelolaan untuk biaya operasional, namun terdapat kelemahan yaitu randahnya sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat. Pengelolaan alokasi dana dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya terdapat berbagai kelemahan sehingga diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat (Widiyanto dkk., 2021).

Berkelanjutan, manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan. Usulan yang masuk dalam program unggulan Pemerintah Kota Magelang, khususnya untuk Rodanya Mas Bagia bisa dilanjutkan karena berdasarkan data empiris tentang harapan dan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Program yang belum selesai dalam siklus tahunan ini, diharapkan terus dilanjutkan. Keberlanjutan program ini sangat diharapkan oleh masyarakat, dengan catatan dipermudah pengusulan, pelaporan, dan pendampingan untuk realisasi program. Keberlanjutan program ini diharapkan mampu dilanjutkan dan diteruskan dengan terus memberikan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat terkait tujuan dan esensi program. Diharapkan partisipasi seluruh masyarakat di Kota Magelang mampu dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan yang dimiliki.



#### C.4. Pembahasan

Deskripsi evaluasi CIPP dijelaskan secara data kuantitatif bahwa aspek yang paling rendah kuantifikasinya adalah evaluasi *context* dengan persentase 58%, evaluasi *input* dengan persentase 69%. Sedangkan komponen evaluasi proses dengan persentase 66%, dan evaluasi produk dengan persentase 69%. Dari sisi kelayakan program, aspek hukum memenuhi aspek legalitas hukum, tidak melanggar aspek hukum dan perundangan sehingga layak diteruskan. Budaya positif yang memperkuat pemberdayaan masyarakat yang timbul sebagai dampak dari program ini antara lain budaya gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan, musyawarah mufakat, mengidentifikasi permasalahan, dan berdiskusi serta bersepakat menentukan solusi. Keberlanjutan program ini dilanjutkan dan diteruskan dengan cara sosialisasi, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan dan esensi program.

Kelayakan program, kelayakan adalah serangkaian penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah proyek yang akan dijalankan ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Program Rodanya Mas Bagia untuk ke depan bisa dievaluasi dan lebih mengarah pada aspek pertumbuhan ekonomi secara langsung, serta upaya untuk akses lapangan kerja. Semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah artinya semakin rendah pertumbuhan ekonomi, akibatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga akan semakin rendah. Munculnya kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kemampuan mengakses lapangan kerja yang rendah serta sedikitnya peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja bagi masyarakat (Setiyawati & Hamzah, 2007).

Keberlanjutan program, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan, yang mencakup empat ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik, dan budaya. Program Rodanya Mas Bagia juga sebagai investasi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan. Hal ini memperkuat hasil penelitian (Wahyu Azizah & Kusuma, 2018) bahwa kemiskinan ada pengaruh terhadap investasi di Kota Magelang tahun 2006-2018. Pernyataan ini



menunjukkan bahwa perubahan kemiskinan di Kota Magelang memiliki pengaruh terhadap investasi di Kota Magelang pada tahun 2006-2018. Inflasi, PDRB dan kemiskinan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat terhadap investasi di Kota Magelang pada tahun 2006-2018.

Hasil kajian penelitian tentang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Era 4.0: Studi Konten Analisis New Media Pemerintah Kota Magelang, (D. Setiawan & Dwi Wahyunengseh, 2020) menunjukkan bahwa pola respon masyarakat lebih beragam dalam menanggapi unggahan terkait isu kemiskinan/ isu pembangunan yakni berupa *share/repost*, memberikan komentar yang bersifat mendukung, dan mengajukan pertanyaan. Dibandingkan pada unggahan terkait kegiatan pemimpin daerah, peringatan hari besar, dan liputan seremonial lainnya dimana respon pengikut lebih dominan pasif berupa *like*. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang bisa melakukan *hashtag* pengentasan kemiskinan dengan menampilkan peningkatan aspek ekonomi dan kesejahteraan dengan data, fakta dan informasi yang benar. Hal ini menunjukkan perhatian masyarakat pada isu kemiskinan cukup tinggi.

Evaluasi program program Rodanya Mas Bagia ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu, reaktualisasi pendistribusian zakat produktif dengan kewirausahaan sosial guna mengatasi kemiskinan di Kota Magelang (Putra & Putri, 2022). Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji evaluasi CIPP Rodanya Mas Bagia. Penelitian ini bersifat intervensi dari pemerintah kota sedangkan penelitian reaktualisasi berfokus pada pemberdayaan sosial, dimana fokus pada manajemen zakat produktif sehingga sesuai dengan sasaran. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian tentang membangun kewirausahaan sosial untuk mustahiq dengan bantuan zakat produktif (Tolkah, 2020). Dimana penelitian ini berfokus memberdayakan orang yang berhak menerima zakat, dan berfokus membangun dan mendorong untuk mandiri serta memberdayakan modal sosial. Selain itu, terdapat penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua (Kogoya dkk., 2023). Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah daerah pendidikan bagi anak-anak yang ada di distrik Nunggawi,



membiayai biaya studi guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta dibebaskan biaya-biaya pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Selain itu, terdapat program perbaikan rumah layak huni. Letak perbedaannya dengan penelitian tentang program Rodanya Mas Bagia adalah berfokus pada peningkatan kesejahteraan yang dimulai dari pemberdayaan di kelompok sasaran yaitu masyarakat tingkat RT, dimana setiap RT bisa mengajukan hal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan musyawarah masing-masing kelompok masyarakat.

Beberapa penelitian lanjutan yang bisa dilakukan peneliti lain yaitu tentang 1) proses musyawarah dan dinamika rembug warga dalam memetakan kebutuhan dan program di tingkat RT; 2) peningkatan kompetensi pendamping dalam mendampingi kelompok masyarakat sasaran; dan 3) pengembangan sistem informasi Rodanya Mas Bagia dan fungsi pengawasan yang efektif dan efisiensi program untuk menekan angka kemiskinan.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Deskripsi evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP) dijelaskan secara data kuantitatif bahwa aspek yang paling rendah kuantifikasinya adalah aspek evaluasi *context* dengan persentase 58%. Komponen evaluasi *input*/masukan memusatkan perhatian pada rencana dan strategi yang harus dilakukan dengan capaian persentase 69%. Komponen evaluasi proses adalah pelaksanaan program dengan persentase 66%. Komponen terakhir dalam model evaluasi CIPP adalah komponen evaluasi produk dengan persentase 69%. Kelayakan program Rodanya Mas Bagia secara aspek hukum diperoleh data bahwa program ini memenuhi aspek legalitas hukum, sehingga Program Rodanya Mas Bagia tidak melanggar perundangan dan layak untuk diteruskan. Keberlanjutan program diharapkan program Rodanya Mas Bagia mampu dilanjutkan dan diteruskan dengan terus memberikan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat terkait tujuan dan esensi program.





Adapun saran yang diberikan peneliti untuk penyempurnaan program unggulan Rodanya Mas Bagia yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan kualitas kelompok masyarakat sasaran yang meliputi peningkatan kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan untuk berpikir sistematis, kemampuan untuk mengadministrasikan, dan kemampuan untuk melakukan tindak lanjut. Peningkatan kualitas pendamping juga difokuskan pada kemampuan untuk melakukan refleksi kegiatan di kelompok dampungannya serta peningkatan kemampuan untuk melakukan lokakarya secara berkelompok dan berbagai praktik di kelompok masyarakat secara kolektif.
2. Aspek teknis, pola koordinasi bisa dilakukan dengan memodifikasi koordinasi dengan menambahkan tindak lanjut koordinasi dengan mempublikasikan informasi publik tentang hasil koordinasi di tingkat kelurahan sehingga masyarakat lebih memahami kemajuan program. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas koordinasi bisa dilakukan dengan surat edaran atau pamflet resmi yang berisi tentang program Rodanya Mas Bagia, serta bentuk kontribusi yang bisa diberikan kelompok masyarakat sasaran sehingga masyarakat memahami peran dan bentuk kontribusinya.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat, perlunya informasi disampaikan secara langsung oleh agen informasi untuk sosialisasi Rodanya Mas Bagia, bukan hanya untuk pengurus RT tetapi juga untuk anggota masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan program, berkontribusi aktif dalam program, dan meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Kota Magelang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardho, R. I., Prayitno, H. J., Wulandari, M. D., Rahmawati, L. E., & Rasidi. (2021). Analisis Program Unggulan Masyarakat Religius Menuju Masyarakat Madani Berbasis Model CIPP. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar*, 9(2), 173-188. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.v9i2.17376>



- Agus, AP. (2022, 25 Februari). *Rodanya Mas Bagia, Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat dan Bahagia*. Diakses dari <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/magelang/2022/02/25/rodanya-mas-bagia-program-pemberdayaan-masyarakat-maju-sehat-dan-bahagia/> pada 1 November 2022.
- Amani, Asef. (2022, 7 Februari). *Pemkot Magelang Bekali Pokmas Materi Rodanya Mas Bagia*. Diakses dari <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-212618490/pemkot-magelang-bekali-pokmas-materi-rodanya-mas-bagia> pada 1 November 2022.
- Atmoko, M. Hari. (2021, 11 November). *Pemkot Magelang: Keberhasilan "Rodanya Mas Bagia" Butuh Pendamping Mumpuni*. Diakses dari <https://jateng.antaraneews.com/berita/414785/pemkot-magelang-keberhasilan-rodanya-mas-bagia-butuh-pendamping-mumpuni> pada 1 November 2022.
- AY Rusdyantoro. (2018). Chapter III Research Methodology 3.1 Research ... *Экономика Региона, July*, 32.
- Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167-180. <https://doi.org/10.22219/jie.v2i1.6976>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten atau Kota Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dayanto, Swasto. (2021, 11 November). *Program Pemkot Magelang 'Rodanya Mas Bagia' Perlu Pendamping Mumpuni di Tingkat Kelurahan*. Diakses dari <https://www.harianmerapi.com/news/pr-401627694/program-pemkot-magelang-rodanya-mas-bagia-perlu-pendamping-mumpuni-di-tingkat-kelurahan?page=2>, pada 1 November 2022.
- Herlina, N., & Komariah, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 260-277. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.821>
- Hermawati, D. T. (2018). Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(1), 47-59. <http://dx.doi.org/10.30742/jisa1812018446>
- Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Kogoya, T., Kasenda, V., & Pangemanan, F. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Distrik Nunggwawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *GOVERNANCE*, 3(1).



- Kota Magelang. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia. Pemerintah Kota Magelang: Magelang.
- Kurniawati, E. W. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model CIPP (Context, Input, Process, Product). *Jurnal GHAITSA Islamic Education Journal*, 2(1), 19-25.
- Magelang Kota. (2022, 6 Januari). *Garda Terdepan “Rodanya Mas Bagya”, Pemkot Magelang Perkuat Pokmas*. Diakses dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/garda-terdepan-rodanya-mas-bagya-pemkot-magelang-perkuat-pokmas/> pada 1 November 2022.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib Journal of Pesantren Education*, 6(1), 111-125. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- Murdiyana & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS (Penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran)*, 3(1), 1-16.
- Putra, E. S., & Putri, A. (2022). Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan di Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 768-774. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.287>
- Prokompim. (2021). *Realisasikan Rodanya Mas Bagyo, Tiap RT Susun Rencana Kebutuhan Melalui RKM*. Diakses dari <https://humas.magelangkota.go.id/realisasikan-rodanya-mas-bagyo-tiap-rt-susun-rencana-kebutuhan-melalui-rkm/> pada 1 November 2022.
- Setiawan, D., & Wahyunengseh, R. D. (2020). Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Era 4.0: Studi Konten Analisis New Media Pemerintah Kota Magelang. *JPALG Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(2), 141–156.
- Setiawan, N. (2007). Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie - Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya. *Repository Pustaka Ilmiah*, Universitas Padjadjaran.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>



- Sutopo, D. S., & Shabrina, D. N. (2022). Srektrum Perencanaan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 57-68. <https://doi.org/10.25077/jsa.8.1.57-68.2022>
- Tolkah. (2020). Membangun Kewirausahaan Sosial untuk Mustahiq dengan Bantuan Zakat Produktif. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 4(1), 482-495. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.988>
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 26-33. doi: 10.31002/kalacakra.v2i1.3621